



PEDOMAN RINTISAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

GURU TERINTEGRASI

BERKEWENANGAN TAMBAHAN

(PPGT)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2012





**PEDOMAN
RINTISAN PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI GURU TERINTEGRASI
BERKEWENANGAN TAMBAHAN
(PPGT)**

**DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012**

Tim Penyusun

Supriadi Rustad (Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

A. Suhaenah Suparno (Universitas Negeri Jakarta)

Totok Bintoro (Universitas Negeri Jakarta)

Ivan Hanafi (Universitas Negeri Jakarta)

Martadi (Universitas Negeri Surabaya)

Andreas Priyono (Universitas Negeri Semarang)

Suyud (Universitas Negeri Yogyakarta)

Paidi (Universitas Negeri Yogyakarta)

Lisyanto (Universitas Negeri Medan)

Agus Susilohadi (Dit. Diktendik – Ditjen Dikti)

Ramlan Harahap (Dit. Diktendik – Ditjen Dikti)

Sugiyatno (Dit. Diktendik – Ditjen Dikti)

Kontributor:

St. Budi Waluya (Universitas Negeri Semarang)

Sugiyanto (Universitas Negeri Semarang)

Sucipto Hadi Purnomo (Universitas Negeri Semarang)

Rochsid Tri Hanggoro Putro (Universitas Negeri Semarang)

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra jabatan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, disusun Pedoman Rintisan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan). Pedoman ini memuat pendahuluan, penyelenggaraan, penjaminan mutu, kerjasama, tugas dan fungsi instansi terkait, dan sistem pelaporan. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan program pendidikan profesi guru terintegrasi.

Terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku pedoman ini.

Jakarta, Juni 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso
NIP 19530909197803100

Daftar Isi

| | Halaman |
|--|---------|
| Halaman Judul | |
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| Daftar Gambar | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latarbelakang | 1 |
| B. Landasan Hukum | 7 |
| C. Tujuan | 8 |
| | |
| BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG | 9 |
| A. Profil Lulusan Rintisan Program PPG Terintegrasi | 9 |
| B. Persyaratan Peserta | 13 |
| C. Sistem Rekrutmen Peserta Rintisan Program PPG Terintegrasi | 14 |
| | |
| BAB III KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN | 19 |
| A. Struktur Kurikulum | 19 |
| B. Sistem Pembelajaran | 25 |
| | |
| BAB IV ASRAMA SEBAGAI KOMUNITAS PEMBELAJARAN | 41 |
| A. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Berasrama | 42 |
| B. Program Pendidikan Berasrama | 45 |
| C. Persiapan yang Perlu dilakukan LPTK | 46 |
| D. Fasilitas Yang Diharapkan Dapat Disediakan LPTK | 47 |

| | | |
|--------|--|----|
| BAB V | STRATEGI IMPLEMENTASI | 49 |
| | A. Tahap Pra kondisi | 49 |
| | B. Tahap Konsolidasi Internal LPTK Penyelenggara | 50 |
| | C. Tahap Perekrutan Peserta | 51 |
| | D. Tahap Pelaksanaan Rintisan Program PPGT | 53 |
| | E. Peran dan Tanggungjawab | 53 |
| | F. Monitoring dan Evaluasi | 54 |
| BAB VI | SISTEM PENJAMINAN MUTU | 55 |
| | A. Sistem Penjaminan Mutu | 55 |
| | B. Ruang Lingkup dan Standar Mutu Akademik | 56 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | 63 |

Daftar Gambar

Halaman

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Alur Mekanisme Perekrutan Calon Mahasiswa Rintisan Program PPGT | 17 |
| Gambar 2 | Mekanisme Perekrutan Peserta Rintisan Program PPGT | 18 |
| Gambar 3 | Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SD | 21 |
| Gambar 4 | Model Kurikulum Rintisan Program PGPT Guru SM | 22 |
| Gambar 5 | Tahapan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 29 |
| Gambar 6 | Diagram Alur Pelaksanaan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Non-Blok | 35 |
| Gambar 7 | Diagram Alur Pelaksanaan <i>Workshop</i> Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Blok | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut kemampuan akademik dan pedagogik yang memadai. Guru sebagai jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif lama dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi, dari penguasaan bidang studi, landasan keilmuan kegiatan mendidik, sampai strategi menerapkannya secara profesional di lapangan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan tersebut dilaksanakan setelah jenjang program S1 (Sarjana).

LPTK telah memiliki pengalaman cukup panjang dalam mempersiapkan guru secara terintegrasi antara pendidikan akademik kependidikan dengan pendidikan profesi yang dikenal dengan sistem *concurrent* terintegrasi. Dalam sistem yang terintegrasi, pembentukan kompetensi akademik bidang keahlian dilaksanakan berdampingan dengan pembentukan akademik

kependidikan yang bermuara pada latihan praktik di tempat otentik yaitu sekolah.

Pengalaman lain LPTK dalam penyiapan guru yang akan bertugas dalam kondisi khusus, berupa proyek rintisan di FKIP Universitas Sebelas Maret, yang mengembangkan sistem SD kecil di Palangkaraya dan Kendari pada akhir tahun 1970-an, yang kemudian diadopsi sebagai subsistem pendidikan di Indonesia. Program ini lahir dari kenyataan bahwa ada banyak daerah-daerah yang secara geografis terpencil, dan berpenduduk relatif sedikit, sehingga jumlah anak usia sekolah dasar kurang dari 60 orang. Tentu tidak efisien mengelola sekolah dengan 60 anak dari berbagai tingkatan kelas menggunakan standar seperti sekolah reguler dengan jumlah peserta didik seperti di daerah lain yang relatif padat penduduknya. Dengan penugasan guru untuk mengajar kelas rangkap tanpa desain yang benar, guru pindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain meninggalkan anak-anak tanpa termonitor dengan baik. Jalan keluarnya adalah menyelenggarakan pembelajaran untuk anak dari tingkat kelas yang berbeda dalam satu ruang belajar. Pengelompokan peserta didik dilakukan berdasarkan jenjang kelas yang berbeda dibantu dengan sistem belajar menggunakan modul yang memungkinkan kelompok anak tetap belajar, sementara guru melaksanakan pembelajaran untuk kelas lain.

Model *multigrade* untuk Rintisan Program PPG SD Terintegrasi yaitu model PPG yang membekali calon guru agar memiliki kemampuan mengelola lebih dari satu kelas di SD (Kelas 1, 2, dan 3 dalam satu ruang belajar, dan 4, 5 dan 6 dalam satu ruang belajar lainnya). Menurut data terakhir ada sekitar 24.000 sekolah dasar di Indonesia yang mempunyai peserta didik kurang dari 90 orang/sekolah, dan 5.000 sekolah dasar dengan peserta didik kurang dari 50/sekolah (World Bank, November 2010). Menurut

data yang ada, kebutuhan guru SD pada tahun 2008 sebanyak 286.993 guru kelas.

Pada Tahun 1990-1993 LPTK pernah melakukan ujicoba melaksanakan PPL intensif selama 3 bulan. Mahasiswa calon guru sekolah dasar tersebut berada di lapangan sehari penuh dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Mereka bukan saja menjalankan latihan praktik mengajar setiap hari kerja, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka, usaha kesehatan sekolah dan pertemuan dengan orang tua peserta didik.

Konsep kewenangan tambahan juga pernah dikembangkan di LPTK pada paruh waktu tahun 1980-an yang dikenal dengan program PSSM (*Post Secondary Subject Mastery*) yaitu membekali calon guru untuk mendapatkan kewenangan mengajar kedua yaitu kewenangan untuk mengajar bidang studi tambahan dari yang selama ini dipersiapkan untuk mereka (analog mayor-minor). Beban belajar bagi mahasiswa tersebut berkisar antara 14 - 16 SKS.

Sementara itu di beberapa daerah, telah ada rintisan pendidikan satu atap antara SD dengan SMP. Perintisan sekolah satu atap sejalan dengan konsep pendidikan dasar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketersediaan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan di mana terdapat satuan pendidikan SD dan SMP yang satu atap atau berdekatan menuntut keluwesan dalam penyediaan tenaga pendidik yang dapat melayani kedua satuan pendidikan tersebut yang memiliki karakteristik sedikit berbeda namun dalam mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks seperti ini yang dimaksud dengan kewenangan tambahan adalah guru

tersebut dapat mengajar baik di SD maupun di SMP, yang berarti di samping sebagai guru kelas di SD, juga memiliki kewenangan mengajar salah satu mata pelajaran di SMP (dari 5 mata pelajaran pokok di SD). Khusus untuk keadaan yang terakhir ini, LPTK belum mempunyai pengalaman mempersiapkan guru secara konsisten.

Di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) guru mengajar mata pelajaran. Sampai saat ini jenis keahlian di SMK mencapai 121 kompetensi keahlian (Keputusan Dirjen Mandikdasmen, No. 251/C/Kep/MM/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan). Struktur kurikulum membagi kelompok mata pelajaran ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok adaptif, normatif, dan produktif. Mata pelajaran adaptif berfungsi menyiapkan kemampuan dasar yang memiliki daya transfer terhadap semua mata pelajaran keahlian. Sebagai contoh Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, Kimia, IPA, dan Kewirausahaan. Kelompok mata pelajaran normatif menyiapkan para lulusan yang memiliki kompetensi kepribadian sebagai manusia Indonesia yang pancasilais, seperti mata pelajaran Agama, dan PKn, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Kelompok mata pelajaran produktif mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian yang handal dalam lebih dari 121 kompetensi keahlian. Setiap kompetensi keahlian produktif menuntut penguasaan konsep-konsep yang relevan dengan bidang keahliannya disamping praktikum yang intensif, untuk menjamin kompetensi lulusan yang kompetitif. Atas dasar ini maka sangat berat jika seorang lulusan dituntut untuk menguasai dua bidang keahlian produktif. Oleh karena itu maka kewenangan tambahan yang dimungkinkan dipersiapkan pada program penyiapan calon guru ini adalah kewenangan dalam mengajar mata pelajaran produktif dan adaptif. Sebagai contoh, calon guru dengan kewenangan mengajar dalam mata pelajaran Elektro atau Matematika memiliki kewenangan mengajar adaptif dalam mata

pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI).

Kenyataan di lapangan terdapat fenomena di mana beberapa SMK kekurangan guru untuk guru adaptif sebanyak 5.980 guru, dan kekurangan guru produktif sebanyak 18.165 guru (MoNE, 2009). Di samping itu terjadi kelebihan guru normatif sebanyak 16.046 guru. Untuk mewujudkan keberhasilan Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) maka dipandang perlu pemberdayaan asrama untuk menunjang pendidikan karakter agar mahasiswa memiliki kebiasaan berperilaku sebagai calon guru.

Pada tahun 2009, Ditjen Dikti sudah menugaskan 15 LPTK untuk melaksanakan PPG SD Prajabatan berasrama. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya dukungan pembinaan mahasiswa di asrama dalam membentuk karakter sebagai guru. Selain itu pengalaman melaksanakan PPG PGSD berasrama menunjukkan pentingnya penyiapan guru pamong sebagai supervisor dalam PPL.

Lebih dari 340 LPTK di seluruh Indonesia telah meluluskan Sarjana Pendidikan yang terintegrasi dengan penyiapan guru profesional (ditandai dengan pemberian Sertifikat Akta Mengajar IV), sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang para lulusan tersebut belum memiliki kewenangan secara formal meski mereka telah menyelesaikan program pendidikan akademik dan profesinya selama 4 tahun.

Penilaian menyeluruh tentang mana dari kedua sistem ini yang lebih efektif belum pernah dilakukan secara sistematis. Pemikiran yang berkembang setelah mengobservasi keadaan ini dan didorong oleh kewajiban untuk memberikan layanan kesempatan kepada putra-putra bangsa dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan

tertinggal) perlu dicari modus penyelenggaraan pendidikan calon guru yang memungkinkan mendapatkan pendidikan persiapan yang berkualitas, dalam waktu yang memungkinkan calon guru segera dapat melayani masyarakat tersebut.

Pendidikan profesi harus mengacu pada ketersediaan lapangan kerja (keseimbangan antara *supply* dan *demand*); karenanya kebutuhan guru dalam jumlah yang cukup dan mutu yang memenuhi standar perlu dihitung secara cermat. Koordinasi dan kerjasama secara intensif antara lembaga pendidikan yang mempersiapkan guru dan institusi pengguna jasa layanan guru, merupakan keniscayaan. Oleh karena itu di samping penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang konsekutif (setelah S1) dicoba untuk dikembangkan kembali program profesi guru prajabatan yang terintegrasi dengan program S1 akademik, berkewenangan tambahan, dan berasrama sebagai rintisan (*piloting*), untuk selanjutnya disebut Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) disingkat Rintisan Program PPGT.

Rintisan Program PPGT yang dimaksud dalam Panduan ini adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan dan dilanjutkan dengan PPL yang intensif di sekolah mitra serta diakhiri uji kompetensi dengan memiliki kewenangan tambahan (*multy grade/multy subject*).

Kewenangan tambahan adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang terdiri atas kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Kewenangan tambahan bagi guru SMK adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu

mata pelajaran produktif dengan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Pendidikan berasrama adalah pendidikan bagi mahasiswa Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Tambahan) selama tinggal di asrama untuk mendapatkan program pendidikan karakter calon guru dan pendalaman materi mata pelajaran yang diperlukan.

Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang dengan pencapaian pembangunan yang rendah, memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan SDM di bawah rata-rata indeks nasional (RPJM 2010-2014). Daerah terdepan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga. Daerah terluar adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan laut lepas.

Sejalan dengan kondisi di daerah 3T dan didukung pengalaman LPTK menyelenggarakan pendidikan guru secara terintegrasi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Rintisan Program PPGT. Rintisan Program PPGT bertujuan menghasilkan model pendidikan guru untuk melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan tambahan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Kepmendiknas Nomor 126/P/2011 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Memberi acuan bagi LPTK dalam menyelenggarakan Rintisan Program PPGT;
2. Memberi arah bagi LPTK penyelenggara Rintisan Program PPGT agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi;
3. Menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Rintisan Program PPGT

BAB II

PROFIL LULUSAN DAN PESERTA

A. Profil Lulusan Rintisan Program PPGT

Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai sekolah menengah. Kedudukan guru dalam sistem persekolahan menempati posisi strategis, berada di garis paling depan, mengajar di depan kelas, menghadapi dan mengatasi secara langsung berbagai persoalan yang terjadi dengan peserta didik di kelas dan di sekolah, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat nonakademik. Keberhasilan peserta didik menguasai pengetahuan dan mengasah ketajaman keterampilan, bergantung kepada guru dalam memberi arahan, tuntutan, bimbingan, dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, guru bukan hanya menjadi ujung tombak pendidikan di sekolah, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan secara nasional. Hasil studi Hattie (2003) yang mengatakan bahwa faktor guru mempunyai sumbangan besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan pencapaian hasil belajar peserta didik di sekolah dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya menguatkan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa ketersediaan guru yang bermutu dan profesional merupakan tuntutan mutlak yang diyakini akan dapat memberi sumbangan sangat berarti terhadap pencapaian keberhasilan pendidikan.

Pasal 1 ayat (1) PP No. 74/2008 tentang Guru, menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, guru wajib memiliki kompetensi yang diharapkan dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsinya sebagai guru profesional, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dengan demikian, untuk menghasilkan guru profesional sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru), perlu dirumuskan profil lulusan Rintisan Program PPGT yang memiliki keunggulan kompetensi sebagai berikut.

1. Unggul dalam Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemampuan pengelolaan pembelajaran seorang guru dicerminkan dengan memahami landasan kependidikan, memahami perkembangan peserta didik, mengembangkan kurikulum atau silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar, mendorong peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.

Di samping itu, guru juga kreatif dalam menciptakan alat bantu pembelajaran, terutama memanfaatkan bahan-bahan bekas pakai yang terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakatnya.

2. Unggul dalam Kompetensi Kepribadian

Guru memiliki sifat religius, taat beragama dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga dapat menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik dan masyarakat di

lingkungannya. Guru yang unggul dalam kompetensi kepribadian dapat menunjukkan sosok utuh guru yang mencerminkan ciri-ciri dan sifat-sifat berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Guru memiliki penampilan yang mantap, meyakinkan dalam setiap langkah, sikap, dan tutur kata sehingga memberi kesan baik dan mendalam bagi peserta didik. Selain itu, guru lulusan memiliki sifat kepemimpinan yang tegas, disiplin, taat aturan, dan teguh dalam pendiriannya yang digunakan sebagai bekal untuk membina, mengarahkan, membimbing, dan menuntun peserta didik menjadi manusia yang cerdas, bermanfaat, dan bertanggungjawab.

Guru memiliki karakter yang kuat sebagai hasil dari olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Karakter yang kuat tercermin pada nilai utama karakter: jujur, cerdas, tangguh dan peduli.

- a. Jujur adalah lurus hati, tulus, ikhlas, menyatakan apa adanya; terbuka; konsisten antara yang dikatakan dan yang dilakukan; berani berkata benar; dapat dipercaya; dan tidak curang.
- b. Cerdas adalah berfikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh perhitungan; rasa ingin tahu yang tinggi; berkomunikasi efektif dan empatik; bergaul secara santun; menjunjung kebenaran dan kebajikan; mencintai Tuhan dan lingkungan
- c. Tangguh adalah pantang menyerah; andal; kuat berpendirian; disiplin; tabah; dan memiliki sikap ketahananmalangan yang tinggi.
- d. Peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan; bertindak santun; toleran terhadap perbedaan; tidak suka

menyakiti orang lain; mau mendengar orang lain; mau berbagi; tidak merendahkan orang lain; tidak mengambil keuntungan dari orang lain; mampu bekerjasama; mau terlibat dalam kegiatan masyarakat; menyayangi manusia dan makhluk lain; setia; cinta damai dalam menghadapi persoalan.

3. Unggul dalam Kompetensi Sosial

Sebagai anggota masyarakat, guru dapat berkomunikasi melalui lisan, tulisan, atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Guru juga dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku, serta menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Komunikasi merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat memberikan kejelasan pesan yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan informasi yang diterima. Kemampuan komunikasi guru yang hebat dicirikan dengan penyampaian pesan yang sistematis dan runtut, menggunakan bahasa baku, intonasi suara yang tepat, dan penggunaan bahasa tubuh yang sesuai.

4. Unggul dalam Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya serta mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya memiliki (a) penguasaan terhadap materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan

pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu, dan (b) penguasaan terhadap konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Guru lulusan Rintisan Program PPGT memiliki kewenangan untuk mengajar 2 (dua) mata pelajaran pada jenjang berbeda atau jenjang yang sama. Untuk jenjang Sekolah Dasar, guru mempunyai kewenangan sebagai guru kelas SD dan sebagai guru SMP pada salah satu dari 5 (lima) mata pelajaran pokok SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, atau IPS). Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), guru mempunyai kewenangan mengajar pada kelompok Mata Pelajaran Produktif (sesuai dengan kompetensi keahliannya) dan salah satu mata pelajaran di kelompok Mata Pelajaran Adaptif (Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Komputer dan Kewirausahaan).

B. Persyaratan Peserta

Rintisan Program PPGT dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan guru di daerah yang masuk kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Untuk itu, peserta Rintisan Program PPGT diprioritaskan berasal dari daerah tersebut. Persyaratan peserta adalah sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA/SMK) dari satuan pendidikan yang terakreditasi;
2. Berasal dari wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);

3. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada;
4. Bersedia ditugaskan di wilayah asal yang telah ditentukan, setelah lulus pendidikan;
5. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
6. Bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
7. Mendapatkan izin/rekomendasi tertulis sebagai calon mahasiswa Rintisan Program PPGT dari pemerintah daerah setempat;
8. Khusus untuk calon mahasiswa Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru SD Terintegrasi dengan kewenangan tambahan mata pelajaran IPA SMP, berlatar belakang pendidikan SMA jurusan IPA.

C. Sistem Perekrutan Mahasiswa Rintisan Program PPGT

Guru profesional sangat ditentukan oleh kualitas masukan dan proses pendidikannya, sehingga akan dihasilkan keluaran seperti yang telah ditetapkan dalam standar profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sistem perekrutan harus mampu menjaring dan menyaring putra-putri terbaik dari daerah 3T untuk menjadi pendidik profesional dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah 3T. Rintisan Program PPGT ini dilaksanakan oleh LPTK yang ditetapkan dengan menerapkan sistem pendidikan guru yang mengintegrasikan proses perkuliahan dan pengenalan lapangan sedini mungkin melalui magang (*internship*) serta melaksanakan pengabdian (KKN) di daerah 3T sebelum melaksanakan pendidikan profesi.

Sistem perekrutan mahasiswa Rintisan Program PPGT dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan
 - a. Calon mahasiswa Rintisan Program PPGT mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut.
 - 1) Format isian calon mahasiswa (Format P-1);
 - 2) Foto kopi ijazah SMA/MA/SMK yang dilegalisasi oleh sekolah asal;
 - 3) Fotokopi nilai UN yang dilegalisasi oleh sekolah asal;
 - 4) Fotokopi rapor mulai kelas I sampai dengan kelas III yang di dilegalisasi oleh sekolah asal;
 - 5) Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan sesuai peraturan yang berlaku dan kesediaan ditempatkan di daerah 3T;
 - 6) Surat pernyataan ijin/rekomendasi dari pemerintah daerah tentang calon peserta Rintisan Program PPGT;
 - 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 8) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - 9) Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang;
 - 10) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon mahasiswa Rintisan Program PPGT dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
 - c. Daftar calon mahasiswa Rintisan Program PPGT yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya dikirim ke LPTK yang ditunjuk dalam bentuk cetakan (Format P-2).

- d. Bagi calon yang lulus seleksi, dipersyaratkan menyertakan jaminan penempatan dari pemerintah daerah (bupati) pengirim.
2. Seleksi Akademik oleh LPTK
 - a. LPTK melakukan verifikasi dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - b. LPTK melakukan seleksi akademik berdasarkan nilai UN dan nilai rapor kelas I sampai dengan kelas III.
 - c. LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta melaporkan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit. Diktendik) Ditjen Dikti dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP).
 - d. Kriteria dan mekanisme seleksi disusun bersama oleh LPTK penyelenggara Rintisan Program PPGT.

3. Mekanisme Perekrutan

Mekanisme pelaksanaan Rintisan Program PPGT dimulai dari kegiatan penetapan kuota kabupaten/kota, sosialisasi, seleksi, hingga penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pelaksanaan perekrutan calon mahasiswa melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Ditjen Dikti; 2) BPSDMPK & PMP; 3) Direktorat P2TK Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, dan Ditjen Dikmen; 4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 5) LPTK, dan 6) peserta SM-3T.

Alur mekanisme perekrutan calon mahasiswa Rintisan Program PPGT disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Alur Mekanisme Perekrutan Calon Mahasiswa Rintisan Program PPGT

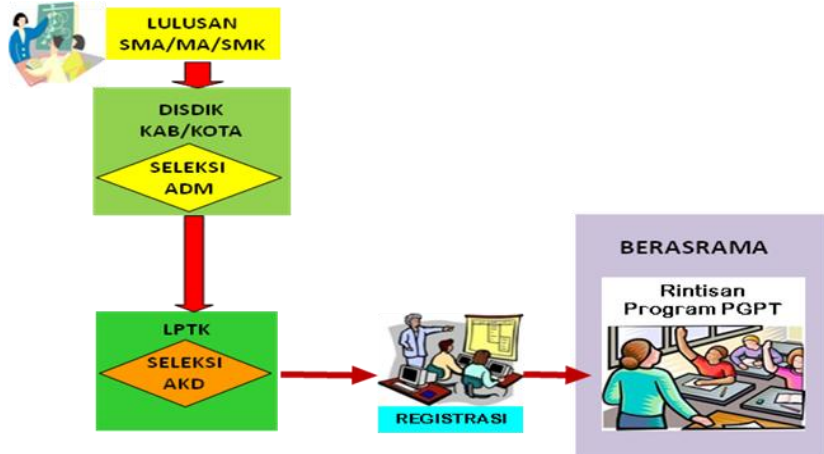
Penjelasan alur mekanisme perekrutan calon mahasiswa Rintisan Program PPGT sebagai berikut.

- a. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti menetapkan kuota;
- b. BPSDMP & PMP dan Ditjen Dikti melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Rintisan Program PPGT, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPTK tentang perekrutan calon peserta dan pelaksana Rintisan Program PPGT;
- c. Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pendaftaran ke sekolah/calon mahasiswa;
- d. Peserta mengisi formulir pendaftaran (Format P-1);
- e. Formulir pendaftaran (Format P-1) dilengkapi dokumen persyaratan pendaftaran, dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- f. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan menetapkan calon peserta yang lulus dengan

menggunakan Format P-2, selanjutnya dikirim ke LPTK yang ditugasi beserta dokumen persyaratan pendaftaran.

- g. LPTK melakukan verifikasi dokumen dan seleksi akademik melalui tes dan/atau non tes.
- h. LPTK mengumumkan hasil seleksi dan melaporkan secara *online*

Secara skematik mekanisme perekrutan peserta Rintisan Program PPGT disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Perekrutan Peserta Rintisan Program PPGT

BAB III

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN

A. Struktur Kurikulum

Sosok utuh kompetensi guru profesional mencakup: *pertama* kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani, *kedua* penguasaan bidang keahlian secara keilmuan dan kependidikan, *ketiga* kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik meliputi: a) perancangan pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran, c) penilaian proses dan hasil pembelajaran, d) pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan *keempat* pengembangan profesionalitas berkelanjutan.

Kompetensi tersebut dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi tak terpisahkan yaitu dimensi akademik (kompetensi akademik) dan dimensi profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru yang terbagi dalam kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh melalui pendidikan akademik tingkat program sarjana, sedangkan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi.

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 9 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, dan pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Program pendidikan profesi dilakukan setelah program pendidikan akademik (S1). Program S1 diperoleh melalui pendidikan tinggi dengan beban studi: 144 SKS – 160 SKS (Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa); sedangkan program profesi guru diperoleh dengan beban studi: 18 SKS – 20 SKS untuk Guru TK, SD, TKLB, dan SDLB yang berasal dari S1 yang linier, dan 36 SKS – 40 SKS untuk Guru Mapel yang berasal dari S1 yang linier (Kepmendiknas No 8 tahun 2009).

Seperti telah dipaparkan pada Bab I, untuk menjawab permasalahan di beberapa wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) terkait dengan permasalahan disparitas dan tidak meratanya distribusi penugasan guru, maka diperlukan suatu model penyiapan tenaga pendidik dengan kewenangan tambahan. Model ini selanjutnya akan dikembangkan dalam bentuk Rintisan Program PPGT antara Pendidikan Akademik (S1) dan Pendidikan Profesi Guru, yang dikembangkan dengan elemen-elemen kompetensi sebagai berikut.

1. Pengembangan Jiwa Kebangsaan dan Cinta Tanah air, Sosial, Kepribadian, dan Karakter Bangsa,

2. (Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Logika, Teknologi, Seni dan Olahraga,
3. Penguasaan Akademik Kependidikan,
4. Penguasaan Akademik Keahlian,
5. Penguasaan Kecakapan Profesi, dan
6. Penguasaan (Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.

Selanjutnya dari elemen-elemen tersebut dapat dikembangkan model kurikulum PPG untuk guru SD (Gambar 3) dan guru SMK (Gambar 4).

1. Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SD



Gambar 3. Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SD

Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SD dan berasrama ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) semester dengan beban belajar pendidikan akademik sekurang-kurangnya 144 SKS dengan sebaran untuk kewenangan utama 124 SKS (meliputi beban belajar untuk kompetensi akademik kependidikan, kompetensi akademik bidang studi utama, dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial, serta prakondisi PPG melalui magang) dan kewenangan

tambahan 20 SKS (kompetensi akademik bidang studi tambahan), serta beban belajar untuk Program PPG 18 – 20 SKS.

Program ini akan menghasilkan calon guru dengan kewenangan utama sebagai guru kelas dan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS).

Untuk menyiapkan guru profesional, dalam pendidikan akademik (S1) disertai dengan prakondisi dalam bentuk magang/*internship* yang dilaksanakan pada setiap semester pendek, serta Kuliah Kerja Nyata Pendidikan, diakhiri penelitian pendidikan, penyusunan skripsi dan ujian akhir. Dengan menyelesaikan elemen kompetensi akademik kependidikan yang ditandai dengan ujian akhir dan yudicium, mahasiswa langsung mengikuti program PPG.

2. Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SMK



Gambar 4. Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SMK

Model Kurikulum Rintisan Program PPGT Guru SMK dan berasrama ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) semester dengan beban belajar pendidikan akademik sekurang-kurangnya 144 SKS dengan sebaran untuk kewenangan utama 120 SKS (meliputi beban belajar untuk kompetensi akademik kependidikan, kompetensi akademik bidang studi utama, dan pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial, serta pra kondisi PPG melalui magang/*internship*) dan kewenangan tambahan 20 30 SKS (kompetensi akademik bidang studi tambahan), serta beban belajar untuk Program PPG 36 40 SKS.

Program ini akan menghasilkan calon guru dengan kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif dikhususkan pada mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dan mata pelajaran Kewirausahaan.

Kedua model kurikulum tersebut dalam implementasinya antara elemen kompetensi akademik kependidikan dan akademik bidang studi dapat dilaksanakan seiring (paralel) sesuai dengan otonomi akademik LPTK.

Untuk menyiapkan guru profesional, dalam model kurikulum tersebut, pendidikan akademiknya (S1) disertai dengan prakondisi dalam bentuk magang/*internship* yang dilaksanakan pada setiap semester pendek, serta Kuliah Kerja Nyata Pendidikan, diakhiri penelitian pendidikan, penyusunan skripsi dan ujian akhir. Setelah menyelesaikan elemen kompetensi akademik kependidikan yang ditandai dengan ujian akhir dan yudisium, mahasiswa langsung mengikuti program PPG.

Magang adalah bagian penting dan merupakan prakondisi dari sistem penyiapan guru profesional, yang dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Magang tidak sama dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Magang dilaksanakan secara terstruktur dan merupakan beban belajar tersendiri yang dilaksanakan secara blok sesudah ujian akhir semester perkuliahan tatap muka, dengan beban belajar tiap-tiap semester sekurang-kurangnya 1 SKS.
3. Magang dilaksanakan secara gradual/berjenjang untuk mengimplementasikan hasil belajar pada tiap-tiap semester.
4. Magang dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang relevan dan memenuhi syarat.
5. Magang dilaksanakan melalui kerjasama yang kuat dengan sekolah mitra yang memenuhi syarat.
6. Magang dilaksanakan dengan manajemen yang sistematis, seperti penjadwalan, penempatan, proses pemagangan, dan penilaian.

Magang dapat dirancang bertahap/berjenjang yang masing-masing tahap memiliki tujuan yang berbeda, sebagai berikut.

1. Magang 1 bertujuan membangun landasan jatidiri pendidik melalui:
 - a. Pengamatan langsung kultur sekolah.
 - b. Pengamatan untuk membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial.
 - c. Pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik
 - d. Pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas.
 - e. Refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran.
2. Magang 2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui:
 - a. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
 - b. Menelaah strategi pembelajaran.
 - c. Menelaah sistem evaluasi.

d. Membantu mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan perangkat evaluasi).

3. Magang 3

Magang 3 bertujuan agar peserta merasakan langsung proses pembelajaran dan memantapkan jati diri pendidik, dengan menjadi asisten guru, yang dilakukan antara lain melalui kegiatan berikut.

- a. Mengajar dengan bimbingan melekat guru pamong dan dosen pembimbing.
- b. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler.

4. KKN Pendidikan dan Penelitian

- a. Mengimplementasikan secara komprehensif kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional dalam bentuk pengabdian masyarakat di daerah 3T.
- b. Memberikan pengalaman langsung calon pendidik pada tataran sekolah, Dinas Pendidikan (Kab/Kota/Kec.), dan masyarakat/orangtua peserta didik, dengan proporsi waktu yang berimbang.
- c. Memantapkan kemampuan manajerial, komitmen, disiplin, kepekaan sosial, survival, dan komunikasi pendidikan.

B. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran dalam pendidikan akademik memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Keaktifan peserta didik

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan

melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

2. *Higher order thinking*

Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Dampak pengiring

Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effect*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effect*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai calon guru. Sebagai contoh, pembelajaran IPA secara tidak langsung akan menanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik, penerapan strategi pembelajaran melalui diskusi, secara tidak langsung akan membentuk kemampuan komunikasi, menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.

5. Pembelajaran Kontekstual

Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal, tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas perkuliahan.

6. Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik.

7. Belajar dengan berbuat.

Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Proses pembelajaran dalam Program PPG lebih menekankan kepada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran workshop atau lokakarya dengan bimbingan atau asuhan dosen dan guru pamong.

Selanjutnya sistem pembelajaran dalam Program Pendidikan Profesi Guru adalah sebagai berikut:

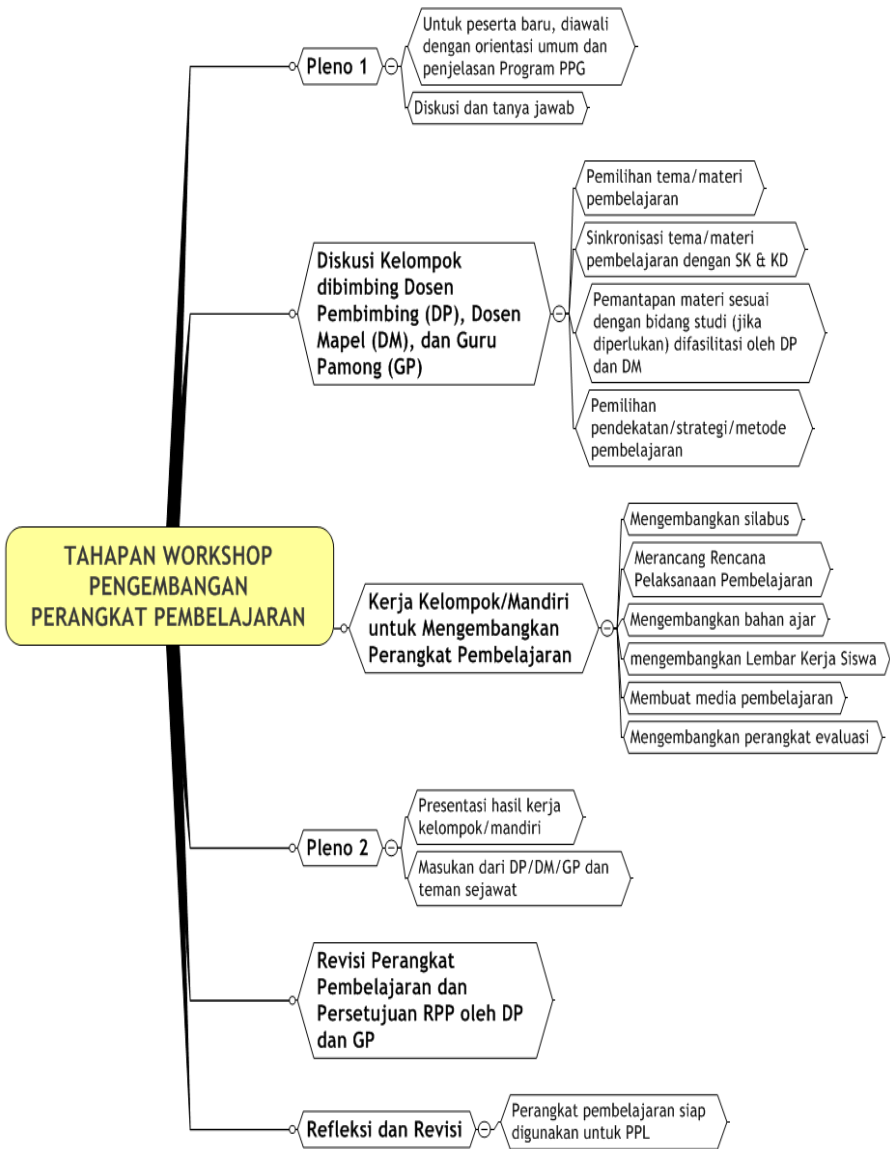
1. *Workshop* Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam program PPG lebih menekankan pada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran workshop atau lokakarya yang difasilitasi oleh dosen pembimbing (DP) dan guru pamong (GP).

Workshop pengembangan perangkat pembelajaran adalah pembelajaran dalam program PPG berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa program PPG agar mampu mengemas dan mengembangkan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik, sehingga mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan PPL, yang ditandai dengan kesiapan: 1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) bahan ajar, 3) media pembelajaran, dan 4) pendukung pembelajaran lainnya, serta 5) kemampuan menampilkan kinerja guru profesional.

Pada program PPG dalam jabatan tidak dilakukan matrikulasi seperti halnya pada program PPG pra jabatan, tetapi diberikan pemantapan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi yang dilaksanakan terintegrasi dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran.

Tahapan dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran program PPG disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Tahapan workshop pengembangan perangkat pembelajaran pada Gambar 5 dijelaskan sebagai berikut.

a. Pleno 1

Workshop pengembangan perangkat pembelajaran diawali dengan pleno, diikuti oleh seluruh peserta PPG, dibuka dan diarahkan oleh Pimpinan Fakultas dan difasilitasi oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Pleno 1 bertujuan untuk: a) membekali peserta PPG tentang hakikat, tujuan, dan ruang lingkup program PPG, b) sistem pembelajaran dalam PPG, c) PPL, d) sistem evaluasi. Tahapan pleno 1 sebagai berikut.

b. Diskusi Kelompok

DP dan GP memfasilitasi peserta workshop untuk menelaah kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik, agar peserta workshop dapat menemukan tema dan materi pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi perangkat pembelajaran. Kegiatan diskusi kelompok dilakukan sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), memilih pendekatan, strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika dalam diskusi kelompok teridentifikasi peserta kurang dan atau mengalami kekeliruan konseptual materi, maka DP dan GP segera melakukan pendalaman dan/atau pelurusan konseptual.
- 2) Memilih dan menetapkan tema dan/atau materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran untuk pengembangan perangkat pembelajaran.

c. Kerja Kelompok/Mandiri

Dalam tahap kerja kelompok/mandiri peserta secara berkelompok dan/atau mandiri menyusun:

- 1) Silabus;
- 2) RPP;

- 3) Bahan ajar;
 - 4) Media pembelajaran;
 - 5) Instrumen evaluasi;
 - 6) Alat bantu pembelajaran lainnya.
- d. Pleno 2
- Hasil dari kerja kelompok dan/ atau mandiri selanjutnya dibawa ke dalam pleno 2 yang bertujuan untuk:
- 1) Memaparkan hasil kerja kelompok dan/atau mandiri;
 - 2) Mendapatkan masukan dari DP, GP, dan teman sejawat.
- e. Revisi
- Peserta PPG diberikan kesempatan untuk merevisi, berdasarkan masukan dari DP, GP, dan teman sejawat.
- f. *Microteaching* dan/atau *peerteaching*
- Peserta PPG diberi kesempatan untuk mengujicobakan RPP dalam bentuk *microteaching* dan/atau *peerteaching* sekaligus untuk memantapkan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran.
- g. Refleksi dan Revisi
- Selesai melaksanakan ujicoba, peserta PPG melakukan refleksi dan revisi.
- 1) Refleksi dilakukan dalam bentuk jurnal belajar untuk menjawab apa yang dipelajari dan dirasakan, kelebihan kekurangan, dan apa rencana tindak lanjutnya.
 - 2) Berdasarkan refleksi diri selanjutnya diberikan masukan dari DP, GP, dan teman sejawat.
 - 3) Berdasar hasil refleksi dan masukan dari DP, GP, dan teman sejawat, peserta PPG melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran.
- h. Persetujuan RPP
- Jika RPP dan kelengkapannya dinyatakan benar dan layak digunakan untuk PPL, maka DP dan GP menyetujui RPP.

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

a. Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan PPL adalah agar peserta PPG menjadi pendidik profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional secara utuh.

Tujuan di atas dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Melakukan pemantapan kemampuan profesional guru.
- 2) Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.
- 3) Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.
- 4) Mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar.
- 5) Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.
- 6) Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran.
- 7) Melakukan penilaian pembelajaran peserta didik dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*).
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik.
- 9) Melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru.
- 10) Melakukan *remedial teaching* bagi peserta didik yang membutuhkan.

11) Mendalami kegiatan non-mengajar meliputi: manajemen pendidikan sekolah, kultur sekolah, kegiatan ekstra kurikuler, layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik.

b. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL

1) Sistem

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Pelaksanaan supervisi klinis dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) pertemuan untuk musyawarah secara demokratis; (3) sasaran supervisi adalah kebutuhan dan aspirasi peserta; (4) pengkajian balikan berdasarkan data observasi untuk memantapkan rencana kegiatan selanjutnya; dan (5) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab peserta.

Penempatan peserta PPL di sekolah mitra LPTK penyelenggara dikoordinasikan oleh pelaksana program PPG dan unit pelaksana PPL.

2) Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PPL dapat dilakukan dengan salah satu dari dua alternatif pola, yaitu: non-blok dan blok. Prosedur dan kegiatan PPL kedua pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

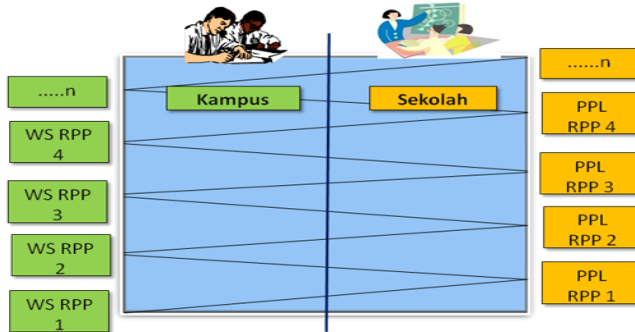
a) PPL Pola Non-blok

PPL pola non-blok dilaksanakan dengan langkah kegiatan sebagai berikut.

- (1) Observasi dan orientasi di sekolah mitra selama 1 minggu.
- (2) *Workshop* RPP 1.
- (3) Praktik mengajar RPP 1 di sekolah.
- (4) Refleksi praktik mengajar RPP 1.
- (5) *Workshop* RPP untuk praktik mengajar berikutnya sampai selesai.
- (6) Ujian PPL dilaksanakan dengan rentang waktu selama 1 minggu pada akhir kegiatan, termasuk 1 kali kesempatan ujian ulang jika tidak lulus.

Untuk memberikan pengalaman melaksanakan PTK, salah satu RPP dirancang sebagai PTK. Rancangan PTK berupa proposal yang selanjutnya akan dilaksanakan bersama guru. Hasil pelaksanaan PTK adalah laporan PTK.

Diagram alur pelaksanaan *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL pola non-blok disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Diagram Alur Pelaksanaan Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Non-blok

b) PPL Pola Blok

Prosedur dan kegiatan PPL dalam pola blok dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik PPG. Di semester pertama peserta PPG menyelesaikan *workshopSSP* yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua PPG, peserta PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

PPL pola blok dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Persiapan PPL melalui observasi dan orientasi di sekolah mitra.
- (2) Praktik mengajar terbimbing.
- (3) Praktik mengajar mandiri.
- (4) Ujian praktik mengajar.

Untuk memberikan pengalaman melaksanakan PTK, salah satu RPP dirancang sebagai PTK. Rancangan PTK berupa proposal yang selanjutnya akan dilaksanakan

bersama guru. Hasil pelaksanaan PTK adalah laporan PTK.

Diagram alur pelaksanaan *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL dengan pola blok dapat disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7: Diagram Alur Pelaksanaan *Workshop* Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Blok

Untuk peserta PPG dengan beban belajar 18 – 20 SKS (guru PAUD, SD, dan PLB jenjang PAUD dan SD), pelaksanaan *Workshop* dan PPL disarankan menggunakan pola Blok.

c. Pelaksanaan PPL

1) Tempat Kegiatan

a) PPL dilaksanakan di sekolah mitra.

b) Kriteria sekolah mitra.

(1) Sekolah mitra sebagai lokasi PPL PPG sekurang-kurangnya memiliki peringkat akreditasi B.

(2) Terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK

penyelenggara PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.

2) Tahapan Pelaksanaan

a) Persiapan PPL

Persiapan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) penetapan peserta PPL;
- (2) pendataan dan pemetaan sekolah;
- (3) penetapan DP;
- (4) koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan GP dan jadwal pelaksanaan PPL;
- (5) pembekalan DP dan GP; dan
- (6) pembekalan peserta PPL.

b) Pelaksanaan PPL

- (1) Penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra.
- (2) Pelaksanaan PPL di sekolah mitra.
- (3) Penarikan peserta PPL.

c) Penilaian PPL

Proses penilaian, komponen penilaian, dan kriteria kelulusan kegiatan PPL sebagai berikut.

- (1) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan penilaian akhir. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, praktik-mengajar, kemampuan melakukan tindakan reflektif, dan kemampuan aspek personal dan sosial.
- (2) Penilaian dilakukan oleh GP dan DP yang meliputi:
 - (a) praktik mengajar, (b) kegiatan nonmengajar, (c) kompetensi sosial dan kepribadian, (d) portofolio, (e) laporan PPL, dan (f) laporan PTK. Seluruh

aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.

(3) Kriteria kelulusan PPL minimal B.

d. Kegiatan Peserta selama PPL

1) Observasi dan Orientasi Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan peserta PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan sebagai berikut.

- a) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- b) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas guru di dalam dan di luar kelas.
- d) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- e) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahan dan balikan yang diperlukan.
- f) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan observasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.

2) Praktik mengajar

Peserta PPG melakukan kegiatan praktik mengajar meliputi praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Praktik mengajar mandiri diamati oleh DP, GP, dan mengikutsertakan teman sejawat (*openlessor*). Praktik mengajar dilaksanakan sekurang-kurangnya 24 kali pada jenjang kelas yang berbeda, masing-masing jenjang kelas minimal 5 kali. Khusus untuk PPG guru kelas SD, praktik mengajar meliputi kelima mata pelajaran pokok SD.

3) Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial

Peserta PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

4) Melaksanakan kegiatan non-mengajar

Selama PPL peserta PPG melaksanakan kegiatan non mengajar, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

5) Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik mengajar (observasi dan orientasi lapangan, praktik mengajar) dan kegiatan nonmengajar (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

6) Menyusun Laporan PTK

Laporan PTK memuat rumusan masalah dan tujuan, ketepatan metode yang digunakan, hasil perubahan pada

peserta didik, guru dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

7) Mengumpulkan Portofolio

Peserta PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

BAB IV

ASRAMA SEBAGAI KOMUNITAS PEMBELAJARAN

Pendidikan dengan kelengkapan asrama atau pendidikan berasrama bukan sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Telah lama lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menerapkan konsep terkecuali pondok pesantren modern sebagai perkembangan dari pondok pesantren tradisional tetap konsisten menjadikan asrama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan pesantren. Pondok Pesantren dapat dikatakan menjadi cikal-bakal pendidikan berasrama di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan formal persekolahan juga menerapkan sistem pendidikan berasrama, sebagai perintisnya adalah sekolah-sekolah Seminari dan sebagian Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Bahkan dalam perkembangan akhir-akhir ini cukup banyak bermunculan sekolah yang melengkapi fasilitasnya dengan asrama, dikenal dengan sekolah berasrama (*boarding school*) antara lain SMA Matauli di Sibolga Sumatera Utara, SMA Madania di Parung Bogor, SMA Dwiwarna di Parung Bogor, SMA Al-Azhar di Lippo Cikarang, SMA Insan Cendekia di Serpong, SMP dan SMA Al-Kautsar di Sukabumi, MTs dan MA Pondok Modern Gontor, SMA IIBS di Lippo Cikarang, dan SMA Taruna Nusantara di Magelang.

Banyak sekolah yang menerapkan sistem pendidikan berasrama (*boarding school*) didasarkan atas pertimbangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih utuh, yang mencakup cipta, rasa, karsa, dan karya sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam

berpikir tetapi juga berkepribadian mulia. Pemikiran tersebut muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa pada umumnya sekolah non-asrama terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan akademik sehingga banyak aspek lain dari kehidupan anak yang tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang ada dalam pengelolaan program pendidikan pada sekolah non-asrama. Sebaliknya, pendidikan berasrama dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, *life skill* (*soft skill* dan *hard skill*), wawasan NKRI, dan membangun wawasan global.

Itulah sebabnya pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyelenggaraan Rintisan Program PPGT. Melalui pendidikan berasrama dimaksudkan untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh termasuk di dalamnya unggul dalam karakter.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka lingkungan, kehidupan, dan kepengasuhan asrama perlu ditata, dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat menghasikan calon guru profesional. Fasilitas asrama sebagai bagian integral dalam proses pendidikan Rintisan Program PPGT ini harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan, dan penguatan akademik.

A. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Berasrama

Tujuan pendidikan berasrama dimaksudkan untuk: 1) membentuk mahasiswa Rintisan Program PPGT menjadi pribadi bermoral luhur, berprestasi, mandiri, disiplin, sehat jasmani dan rohani; 2) membentuk mahasiswa yang peka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk; dan 3) menumbuhkan pribadi-pribadi yang berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, dan peduli).

Untuk membentuk calon guru yang profesional dan berkarakter seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan asrama, maka perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut.

1. Keteladanan
Secara psikologis manusia memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sikap dan perilaku terpuji. Keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata bagi para mahasiswa. Pengelola asrama harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi para penghuninya dalam kehidupan kesehariannya.
2. Latihan dan Pembiasaan
Upaya membentuk calon guru yang berkarakter bagi mahasiswa di asrama dilakukan melalui latihan mentaati norma-norma yang ada kemudian membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan di asrama, prinsip ini biasanya diterapkan dalam bentuk ibadah bersama, makan bersama, dan aktivitas lain dalam kehidupan berasrama. Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak yang terpatut dalam diri mahasiswa.
3. Pendidikan melalui *Ibrah* (Mengambil Hikmah)
Pengertian *ibrah*, yaitu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dialami manusia untuk mengetahui intisari suatu kejadian yang disaksikan, diperhatikan, dipertimbangkan, diukur dan diputuskan secara rasional sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepada-Nya. Prinsip ini dapat dilakukan melalui kisah-kisah, fenomena alam, atau peristiwa yang terjadi baik di masa lalu maupun sekarang.
4. Pendidikan melalui Nasihat
Nasihat adalah pemberian peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati untuk mengamalkannya. Nasihat ini mengandung tiga unsur, yaitu a) uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa, seperti sopan-santun, ibadah berjamaah, dan kerajinan dalam beramal baik; b) motivasi

dalam melakukan kebaikan; c) peringatan tentang bahaya akibat melanggar larangan.

5. Pendidikan melalui Kedisiplinan

Prinsip ini identik dengan pemberian hukuman yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa apa yang dilakukan tidak benar, sehingga tidak mengulangi lagi. Penerapan prinsip ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan pengurus asrama memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar, sedangkan kebijaksanaan mengharuskan pengurus asrama berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi, tidak terbawa emosi dan dorongan lain.

6. Kemandirian

Kemandirian merupakan kesanggupan dan kemampuan mahasiswa untuk belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, sehingga tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan orang lain. Dengan prinsip kemandirian ini mahasiswa sanggup berdikari, memiliki nilai-nilai kekuatan dan ketabahan dalam meneghadapi tantangan hidup.

7. Persaudaraan dan Persatuan

Kehidupan mahasiswa di asrama senantiasa diliputi oleh suasana keakraban dan persaudaraan karena segala suka dan duka mereka rasakan bersama. Dalam suasana kehidupan asrama yang demikian, para mahasiswa yang berasal dari latar belakang asal daerah, suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama yang berbeda akan terjalin keakraban, persaudaraan, dan persatuan di antara mereka. Nilai-nilai ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas setelah mereka lulus dan terjun mengabdikan diri menjadi guru di berbagai pelosok tanah air.

B. Program Pendidikan Berasrama

Asrama mahasiswa merupakan wadah mahasiswa berkembang dewasa, untuk menemukan jati diri dan memanfaatkan waktu luang. Asrama mahasiswa memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan belajar tetapi juga merupakan lingkungan pergaulan sosial yang membantu membentuk kepribadian para penghuninya. Pola asrama diharapkan memberikan warna positif bagi pengembangan karakter mahasiswa Rintisan Program PPGT dengan menanamkan nilai-nilai yang luhur di antaranya adalah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

Rintisan Program PPGT berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multibudaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi, asal daerah dan pengaruh negatif globalisasi. Dalam kehidupan berasrama mahasiswa Rintisan Program PPGT diberikan pembinaan untuk saling peduli, memiliki kemadirian, kedisiplinan, saling menolong dalam kebenaran, dan tidak membedakan status sosial dan ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di asrama.

Berberapa alternatif program kegiatan di asrama adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan Mental (Bintal). Bintal dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan rohani diantaranya adalah: pendalaman/kajian agama dan *Achievement Motivation Train(AMT)*.
2. Program Belajar Bersama (PBB). Program PBB ini merupakan kegiatan belajar di asrama yang diarahkan untuk saling tolong menolong. Mahapeserta didik yang sudah paham dituntut untuk mau memberikan tutorial kepada mereka yang masih kurang memahami

3. Apel Pagi (Apa). Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara periodik, misal setiap dua pekan. Apel pagi merupakan realisasi dari pengembangan karakter unggul insan asrama dalam pengembangan jiwa patriot, disiplin, dan rasa tanggung jawab.
4. Senam Asrama (Senar). Senam asrama adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat menjaga dan meningkatkan kebugaran *° ± > ± ± i ± § Ydi dalam tubuh yang sehat terdapat*
! ¥ 3 § μ § a E § ± § °
5. Gerakan Budaya Bersih Asrama (GBBA). GBBA merupakan salah satu kegiatan untuk melatih kepedulian dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan asrama.
6. Gugus Disiplin Asrama (GDA). GDA merupakan salah satu bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual, kepribadian, minat-bakat, dan solidaritas antar penghuni asrama.

C. Persiapan yang Perlu Dilakukan LPTK

Terkait dengan maksud dan tujuan pendidikan berasrama Rintisan Program PPGT tersebut, maka tata kelola asrama beserta perangkat aturannya perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh LPTK penyelenggara. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut.

1. Merumuskan visi, misi, prasetya, kode kehormatan, tata tertib, dan etiket kehidupan warga asrama.
2. Sosialisasi visi, misi, prasetya, kode kehormatan, tata tertib, dan etiket kehidupan asrama kepada semua pemangku kepentingan.
3. Menyusun struktur organisasi dan fungsi asrama dilengkapi dengan rumusan diskripsi tugas, tanggung jawab, dan hak setiap unsur pengelola. Jika dipandang perlu dirumuskan juga persyaratan dan masa bakti pengelola asrama.

4. Menyusun jadwal kegiatan penghuni atau warga asrama mulai dari bangun pagi sampai dengan istirahat (jam tidur) malam hari.
5. Secara terencana dan terprogram dijadwalkan kegiatan yang bersifat periodik dan/atau insidental yang dapat menumbuhkan dan membentuk *soft skill* dan *hard skill* atau keterampilan-keterampilan tertentu, seperti dalam bentuk pendampingan belajar, pemanfaatan komputer, kegiatan pendalaman agama, debat, latihan pidato, pengembaraan atau mencari jejak, latihan dasar kepemimpinan, *outbound* proyek/bakti sosial, dan lain-lain.

D. Fasilitas Asrama

Fasilitas asrama menjadi bagian integral dalam proses pendidikan Rintisan Program PPGT. Oleh karena itu fasilitas yang disediakan dan penataannya, harus dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pendidikan guru berasrama sebagaimana telah disebutkan di atas. Fasilitas minimal yang perlu disediakan oleh pihak LPTK antara lain sebagai berikut.

1. Kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur, almari pakaian, meja, rak buku. Jika memungkinkan di dalam kamar tidur disediakan meja kursi belajar.
2. Ruang belajar bersama yang dapat berfungsi juga sebagai tempat diskusi atau rapat warga asrama. Apabila di kamar tidur belum disediakan meja belajar maka meja belajar warga asrama dapat ditempatkan di ruang/tempat belajar.
3. Ruang makan beserta mebel dan perlengkapannya.
4. Sarana ibadah dan pendalaman/kajian agama.
5. Sarana olah raga.
6. Ruang kesehatan yang dilengkapi perlengkapan PPPK dan akses untuk merujuk ke rumah sakit diperlukan.
7. Sarana MCK yang memadai dari segi jumlah dan kebersihan.
8. Wisma pengelola asrama.

9. Ruang dan perlengkapan pendukung lainnya, antara lain dapur, ruang menerima tamu, dan perlengkapan kebersihan.

BAB V

STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Tahap Prakondisi

Tahap prakondisi adalah tahap orientasi yang difokuskan pada analisis konteks dan kebutuhan (*context and needs analysis*), yakni suatu langkah penelitian atau pengkajian untuk mengumpulkan data tentang sejauh mana Rintisan Program PPGT dirasakan sebagai kebutuhan masa kini dan masa mendatang oleh pemerintah daerah (Pemda), LPTK dan masyarakat 3T.

Tahap ini juga melakukan kegiatan analisis kemampuan (*capacity analysis*) dari masing-masing LPTK yang ditetapkan sebagai penyelenggara Rintisan Program PPGT ini, yaitu suatu analisis kemampuan LPTK dalam menyelenggarakan rintisan program secara efektif dan efisien.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

1. Sinkronisasi kebijakan antara LPTK dengan Dinas Pendidikan.
Sinkronisasi Kebijakan antara LPTK dengan Dinas Pendidikan adalah kegiatan-kegiatan diskusi, saling tukar pemahaman, dan penggalangan komitmen bersama demi tercapainya kesamaan visi tentang Rintisan Program PPGT. Kegiatan sinkronisasi dilakukan melalui pertemuan sosialisasi Rintisan Program PPGT yang dihadiri Dinas Pendidikan dan LPTK dengan tujuan: (1) peningkatan pemahaman, (2) peningkatan motivasi (*greget* melakukan) dan (3) peningkatan dukungan bersama atas keberhasilan Rintisan Program PPGT.
2. Visitasi LPTK untuk memperoleh data tentang potensi, peluang, dan kendala.

Visitasi kesiapan LPTK adalah kegiatan pengumpulan informasi (data) tentang konteks penyelenggaraan dan kesiapan input (segala sesuatu yang dibutuhkan bagi Rintisan Program PPGT, melalui kegiatan pengamatan (observasi), angket, dan wawancara di LPTK calon penyelenggara.

3. Penguatan kapasitas asrama dan pengelolaannya

Penguatan kapasitas asrama dan pengelolaannya adalah kegiatan-kegiatan melengkapi fasilitas asrama, pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk melengkapi fasilitas, meningkatkan pengetahuan, motivasi dan ketrampilan mengelola asrama. Kegiatan pendampingan dan pelatihan dilaksanakan secara *in-house training* dengan struktur program pelatihan 80% menekankan praktik dan 20% menekankan pengetahuan.

4. Penguatan kapasitas dosen.

Penguatan kapasitas dosen adalah kegiatan-kegiatan pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan ketrampilan mengelola kelas atau sekolah. Kegiatan penguatan kapasitas dosen melalui penugasan dosen ke sekolah (PDS)/ *Lesson Study* (LS) dan peningkatan kualitas pembelajaran (PKP).

B. Tahap Konsolidasi Internal LPTK Penyelenggara

LPTK penyelenggara adalah LPTK yang dipandang mampu dan diberi tugas secara resmi oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Rintisan Program PPGT. LPTK ini berdasarkan pengalaman yang dimiliki menunjukkan kesesuaian konteks (bersedia melaksanakan), kesiapan input (mempunyai asrama dan fasilitas lain yang memadai), dan berkomitmen untuk bersedia melaksanakan Rintisan Program PPGT secara efektif dan efisien.

Beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan LPTK penyelenggara adalah:

- ◁ Kegiatan sosialisasi Rintisan Program PPGT untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan program Rintisan Program PPGT dan teknik pelaksanaan.
- ◁ Penyusunan Pedoman Rintisan Program PPGT bersama LPTK Penyelenggara, untuk mengembangkan panduan penyelenggaraan. Pedoman disusun dengan maksud untuk:
 - a. memberi acuan bagi LPTK dalam menyelenggarakan Rintisan Program PPGT,
 - b. memberi arah bagi LPTK penyelenggara Rintisan Program PPGT agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi,
 - c. menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Rintisan Program PPGT.
 - d. Pengembangan SIM PPGT
 - e. *In-house training* bagi pengelola di LPTK untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan (managemen), baik dalam pengelolaan secara umum, maupun pengelolaan system informasi.
 - f. *In-house training* bagi pengelola di LPTK untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan (managemen), baik dalam pengelolaan secara umum, maupun pengelolaan.

C. Tahap Perekrutan Peserta

Perekrutan peserta dilakukan secara transparan dan kolaboratif serta bertujuan untuk mendapatkan peserta dengan kriteria: berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menunjukkan tingkat akademik memadai, dan memiliki jiwa keguruan (semangat menjadi gurusebagai pilihan hidup). Oleh sebab itu, beberapa cara perekrutan peserta dipilih untuk mendapatkan calon dengan persyaratan diatas.

Tabel 1. Metode dan Informasi yang Dikumpulkan dalam Perekrutan Peserta

| Metode | Informasi yang dikumpulkan | Keterangan |
|--|--|--|
| 1. Tes Objektif | Tingkat pengetahuan (pengusaan) bidang studi | Jika memungkinkan informasi tes ditambah dengan analisis nilai UN SMA. |
| 2. Tes Intelegensi | Tingkat kecerdasan umum | IQ dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran dasar tentang kecerdasan. |
| 3. Tes Emotional Spiritual Questions (ESQ) | Tingkat kecerdasan emosi | ESQ dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran awal tentang status emosi awal: kepekaan diri, relasi sosial, semangat maju, dst. |
| 4. Wawancara | Cita-cita (Visi hidup), alasan memilih guru sebagai profesi. | Wawancara dimanfaatkan untuk menegaskan kebutuhan masa depan, mental model, cita-cita dan komitmen. |
| 5. Demonstrasi tentang | Kemampuan dasar untuk bicara, mendengar, merespon dan mengembangkan gagasan terstruktur. | Demonstrasi ini adalah untuk mengenal kemampuan dasar berbicara, mendengar, memberi saran, dan menyampaikan gagasan, sebagai bagian penting dari pengajaran. |

Mekanisme pelaksanaan Rintisan Program PPGT dimulai dari kegiatan penetapan kuota provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi, seleksi, hingga penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

D. Tahap Pelaksanaan Rintisan Program PPGT

Penyelenggaraan program PPG dilakukan berbasis azas-azas penyelenggran suatu program rintisan yang transparasi, menekankan kerja sama (kolaborasi), akuntabel, dan menekankan efektivitasefisiensi. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan berikut ini diselenggarakan untuk menjamin keterlaksanaan program rintisan yang efektif.

E. Peran dan Tanggung Jawab

Unsur-unsur yang terlibat dalam perekrutan dan penetapan peserta beserta peran dan tanggung jawab adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Subjek dan Perannya dalam Perekrutan Peserta PPGT

| No | Unsur | Peran/Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| 1. | Ditjen Dikti | <ul style="list-style-type: none"> < Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait < Merumuskan dan menetapkan kebijakan < Menetapkan kuota < Melaksanakan perekrutan < Menetapkan peserta < Mendukung pendanaan Rintisan Program PPGT < Melakukan monitoring dan evaluasi |
| 2. | BPSDMPK & PMP | <ul style="list-style-type: none"> < Penentuan kebutuhan guru < Pendataan data calon guru hasil seleksi |
| 3. | Direktorat P2TK Ditjen PAUDNI, Ditjen Dikdas, dan Ditjen Dikmen | <ul style="list-style-type: none"> < Penentuan kebutuhan guru < Pendataan data calon guru hasil seleksi |

| No | Unsur | Peran/Tanggung Jawab |
|----|------------------------------------|---|
| 4. | Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> < Menyosialisasikan program < Mengidentifikasi calon peserta Menyeleksi calon peserta dengan memperhatikan rekomendasi peserta SM-3T |
| 5. | Tim Pelaksana Nasional Program PPG | <ul style="list-style-type: none"> < Mengontak LPTK < Mengirimkan kuesioner < Melakukan ujicoba < Membuat laporan |
| 6. | LPTK | <ul style="list-style-type: none"> < Membantu pelaksanaan perekrutan calon peserta |
| 7. | Peserta SM-3T | <ul style="list-style-type: none"> < Mengidentifikasi dan merekomendasikan calon peserta |

6. Biaya Penyelenggaraan

Biaya penyelenggaraan program ini bersumber dari dana APBN Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti tahun 2012

7. Pelaporan

Sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan rintisan program PPGT, LPTK perlu memberikan laporan, yang akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja.

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Rintisan Program PPGT. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kesiapan *input*, proses, *output* penyelenggaraan Rintisan Program PPGT, dan mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi mencakup aspek akademik, non-akademik, dan administrasi keuangan.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

A. Sistem Penjaminan Mutu

1. Pengertian

Dalam Pedoman Penjaminan Mutu Ditjen Dikti tahun 2003, dinyatakan bahwa penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

2. Pelaksanaan

Penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terencana bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar mutu layanan pendidikan tinggi melalui suatu program penjaminan mutu dengan target dan kerangka waktu yang jelas serta perbaikan mutu layanan pendidikan yang terus menerus. Penjaminan mutu pelaksanaan Rintisan Program PPGT dilaksanakan secara (a) internal oleh LPTK dan (b) eksternal oleh lembaga di luar LPTK.

B. Ruang Lingkup dan Standar Mutu Akademik

Ruang lingkup Rintisan Program PPGT meliputi komponen masukan, proses dan luaran dengan standar mutu akademik yang harus dipenuhi untuk setiap komponen. Semua komponen harus diarahkan untuk memenuhi standar mutu akademik yang ditetapkan dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam menjamin tercapainya mutu komponen masukan, proses, dan luaran yang dihasilkan Rintisan Program PPGT, evaluasi tingkat keberhasilan mengacu pada standar mutu akademik yang meliputi.

1. Masukan

Sebelum penyelenggaraan Rintisan Program PPGT, semua masukan harus terjamin ketersediaannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

a. Peserta

Peserta PPGT adalah lulusan SLTA yang memenuhi persyaratan administratif dan akademik. Perekrutan peserta sesuai dengan mekanisme seleksi dengan jumlah dan penyebaran daerah yang memenuhi aspek terbuka dan proporsional.

b. Kurikulum

Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai dasar pengembangan kurikulum Rintisan Program PPGT. Kurikulum terdiri atas kurikulum akademik mengacu pada Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002, kurikulum asrama, dan kurikulum PPG yang antara lain memuat (1) *workshop* SSP, (2) PPL, dan (3) kesinambungan dan keseimbangan proporsi *workshop* dan PPL.

- c. Dosen
Dosen adalah dosen mata kuliah dan dosen pembimbing PPG pada LPTK penyelenggara yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan lain yang ditetapkan serta memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Rintisan Program PPGT di kampus dan di asrama.
- d. Guru Pamong
Guru pamong adalah guru sekolah mitra yang memenuhi persyaratan dan bersedia terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan workshop di kampus, magang dan PPL di sekolah mitra.
- e. Sekolah Mitra
Sekolah mitra adalah sekolah tempat pelaksanaan PPL yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh LPTK bersama Dinas Pendidikan. Sekolah mitra menyediakan GP dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan magang dan PPL secara maksimal.
- f. Fasilitas Belajar dan Pendukung
Fasilitas dan sumber belajar di kampus dan di sekolah mitra, serta fasilitas pendukung di asrama yang disediakan oleh LPTK Penyelenggara harus memenuhi syarat standar pelayanan minimal pelaksanaan Rintisan Program PPGT.

2. Proses

Proses penyelenggaraan Rintisan Program PPGT harus berlangsung secara objektif, transparan, partisipatif, kolaboratif, efektif, efisien, dan akuntabel.

a. Pembelajaran di Kampus

- (1) menggunakan pendekatan pembelajaran *Active Learning In Higher Education* (ALIHE) agar dihasilkan calon guru yang dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan *Active Learning In School*(ALIS);
- (2) melibatkan mahasiswa secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian;
- (3) meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa;
- (4) mengarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan;
- (5) Merencanakan pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada metode pembelajaran inovatif, mutakhir, dan serta berorientasi pada *higher order thinking* ;
- (6) Mengarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik, kematangan pribadi dan kematangan sosial sebagai calon pendidik;
- (7) Membangkitkan suasana akademik yang menjamin kebebasan berpikir dan beraktivitas intelektual, seperti: berargumentasi, berani bertanya, melakukan penelitian, dan mengembangkan diri;
- (8) Mengarahkan mahasiswa agar mampu mengemas materi pembelajaran meliputi kesiapan bahan ajar, strategi, media, suasana, dan evaluasi pembelajaran;
- (9) Mengarahkan mahasiswa agar mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;
- (10) Mengarahkan mahasiswa agar mampu mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik dengan efektif;
- (11) Mengacu pada pendekatan kontekstual yang sesuai dengan kriteria mata kuliah yang diajarkan;

- (12) Memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
- b. Pembelajaran di Asrama
- (1) Membentuk kurikulum yang komprehensif-holistik untuk menjamin terbentuknya pribadi yang bertakwa, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli;
 - (2) melibatkan mahasiswa secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kompetensi sosial dan kepribadian dengan proporsi yang sesuai;
 - (3) menginternalisasikan nilai-nilai utama pendidikan karakter (jujur, cerdas, tangguh, dan peduli) dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - (4) membiasakan pola interaksi sosial dengan tata-krama dan tata-aturan yang sesuai dengan perilaku teladan.
- c. Magang di Sekolah Mitra
- (1) memberikan pengenalan lingkungan fisik, administrasi, akademik, sosial, dan budaya sekolah;
 - (2) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah, terutama dalam mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan sekolah tempat melaksanakan magang;
 - (3) memperoleh pelajaran berharga berupa nilai-nilai edukatif, pengalaman, dan refleksi selama melakukan kegiatan magang;
 - (4) menjamin terbentuknya kompetensi calon tenaga pendidik, terutama pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional pada diri mahasiswa didik.
- d. *Workshop* SSP
- Workshop* SSP merupakan kegiatan di kampus untuk menyiapkan perangkat pembelajaran antara lain: silabus, RPP, bahan ajar, perangkat evaluasi, media pembelajaran, dan

alat bantu pembelajaran. Dalam pelaksanaan *workshop*, harus dapat mewujudkan hal-hal berikut.

- (1) kesesuaian produk atau perangkat pembelajaran yang dihasilkan dengan SK, KD, relevansi, dan ketersediaan waktu penyelenggaraan;
- (2) kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan untuk membangun suasana akademik yang dapat mendorong peserta berpikir kritis, berkomunikasi aktif, berargumentasi, berani bertanya, meneliti, mengembangkan diri, dan belajar sepanjang hayat;
- (3) keterlibatan peserta secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian;
- (4) keberlanjutan proses pembelajaran agar peserta dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok.

e. Program Pengalaman Lapangan (PPL)

PPL dalam Rintisan PPGT merupakan pematapan kompetensi bagi peserta melalui pengalaman mengajar di kelas yang memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pelaksanaan PPL ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memahami lingkup tugas dan pekerjaannya sebagai guru profesional. Dalam pelaksanaannya, PPL harus:

- (1) memberikan bekal penguasaan berbagai keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran sesuai bidangnya;
- (2) memberikan bekal kemampuan mendidik secara profesional;
- (3) mengembangkan aspek kepribadian dan aspek sosial di lingkungan sekolah tempat melaksanakan PPL;

- (4) menamankan nilai-nilai edukatif melalui penghayatan, pengalaman dan refleksi selama melakukan kegiatan di sekolah;
- (5) menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dalam bentuk siklus dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat RPP;
- (6) menempatkan peserta di sekolah mitra.

f. Uji Kompetensi

Uji kompetensi merupakan kegiatan akhir Rintisan Program PPGT untuk menilai kemampuan mahasiswa calon guru pada aspek teori dan praktik. Aspek teori diuji melalui uji tulis sesuai dengan bidang studi, sedangkan aspek praktik diuji melalui uji kinerja. Kegiatan uji kompetensi harus memperhatikan standar dan ketentuan, baik persyaratan, tata cara ujian, maupun kriteria kelulusan. Pengembangan instrumen uji kompetensi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran atau pengujian.

3. Luaran

Luaran adalah lulusan Rintisan Program PPGT yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dengan kewenangan tambahan. Lulusan Rintisan Program PPGT mendapat ijazah sarjana pendidikan dan sertifikat pendidik dari LPTK Penyelenggara.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

JADWAL PPGT ANGKATAN 2012

| NO | AKTIVITAS PROG. PPGT | JADWAL | CATATAN |
|----|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Penetapan kuota | 4-8 Juni 2012 | BPSDMP, PMP dan DIKTI |
| 2 | Sosialisasi pelaksanaan Rintisan Program PPGT ke Dinas Pend dan LPTK | 18-20 Juni 2012 | DIKTI |
| 3 | Pengiriman panduan PPGT beserta form dan perl. Pendaft. ke dinas | 2-9 Juli 2012 | DIKTI |
| 4 | Sosialisasi pendaftaran ke sekolah/calon mahasiswa dan peserta SM-3T | 9-13 Juli 2012 | Disdik Kab |
| 5 | Pelaksanaan pendaftaran (dengan mengisi formulir, Format P-1) | 16-27 Juli 2012 | Disdik Kab |
| 6 | Pengiriman Formulir pendaftaran (Format P-1) dilengkapi dokumen persyaratan pendaftaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten | 16-27 Juli 2012 | Disdik Kab |
| 7 | Seleksi administrasi | 30 Juli-3 Agustus 2012 | Disdik Kab & SM-3T |
| 8 | Penetapan calon peserta yang lulus dengan menggunakan Format P-2 | 6-10 Agustus 2012 | Disdik Kab |
| 9 | Pengiriman daftar calon peserta yang lulus ke DIKTI, beserta dokumen persyaratan pendaftaran | 20-24 Agustus 2012 | Disdik Kab |
| 10 | Verifikasi dokumen dan seleksi akademik melalui tes dan/atau non tes | 27-31 Agustus 2012 | DIKTI & LPTK |
| 11 | Koordinasi untuk penetapan kelulusan | 4-5 September 2012 | DIKTI, Disdik Kab |
| 12 | Pengumuman hasil seleksi dan Pelaporan secara <i>online</i> (Format P-3) | 10-11 September 2012 | DIKTI/LPTK |
| 13 | Pemanggilan peserta PPGT | 17-21 September 2012 | DIKTI |
| 14 | Pemberangkatan peserta ke LPTK penyelenggara | 24-31 September 2012 | Disdik Kab- DIKTI |
| 15 | Pelaksanaan PPGT | Mulai 1 Oktober 2012 | LPTK |
| 16 | Monev pelaksanaan PPGT | Mulai November 2012 | DIKTI |

